

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Alih Fungsi Lahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari)

Oleh

Rudy Haryadi¹⁾, Tajur Zulfikar²⁾ Husni Farhani Mubarak³⁾ Ariska Amelia⁴⁾

^{1) 2) 3) 4)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

E-mail : ¹⁾ruddyhrd67@gmail.com, ²⁾tajurzulfikar1161@gmail.com ³⁾hfm.unfari@gmail.com

⁴⁾ariskaamelia2@gmail.com

ABSTRAK. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta, utamanya mengenai alih fungsi lahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari dan berbagai dampak yang terjadi akibat dari alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk teknik penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari Dinas PUPR, Pemerintah Desa Cibodas dan Masyarakat Cibodas Kecamatan Bungursari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta dalam hal alih fungsi lahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan teori dari Soren C. Winter yang terdiri dari 3 variabel yang didalamnya berupa beberapa dimensi diantaranya, dimensi komitmen yang belum cukup kuat dalam penerapan kebijakan, dimensi koordinasi yang belum optimal, dimensi diskresi yang dilakukan akibat tumpang tindihnya kebijakan, serta dimensi respon positif dan respon negatif sebagian masyarakat merasakan baik dampak positif maupun negatif akibat adanya alih fungsi lahan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan

ABSTRACT. In this study, we will discuss how to implement regional spatial plan policies in Purwakarta Regency, especially regarding land use change in Cibodas Village, Bungursari District and the various impacts that occur as a result of the land use change. The method used in this study uses descriptive research with a qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, documentation, and interviews. For informant determination techniques using *Purposive Sampling* techniques consisting of the PUPR Office, Cibodas Village Government and Cibodas Community Bungursari District. The results of this study show that the implementation of the regional spatial planning policy in Purwakarta Regency in terms of land use change in Cibodas Village, Bungursari District has not run optimally. This can be proven by using the theory of Soren C. Winter which consists of 3 variables in the form of several dimensions including, the dimension of commitment that is not strong enough in implementing policies, the dimension of coordination that is not optimal, the dimension of discretion carried out due to overlapping policies, as well as the dimension of positive response and negative response of some people feeling both positive and negative impacts due to land use change.

Keywords: Implementation, Policy, Spatial Planning, Land Use Change

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalankan sehingga dibutuhkan beberapa elemen-elemen pemerintah guna

mendukung berjalannya suatu kebijakan yang sudah dibuat dan di sahkan oleh pemerintah, selain itu perlunya koordinasi dari berbagai instansi yang terkait agar tidak terjadinya miskomunikasi. Terutama

pada instansi yang terkait dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah, sehingga pada pelaksanaannya tidak banyak masalah yang terjadi dan kebijakan yang dibuat pun dapat terealisasi sesuai dengan harapan dan rencana.

Hasil penelitian terdahulu dari Elvie Dyah Fitriana dalam Safitri (2018:3) bahwa dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah, hal yang di temui dalam penelitiannya yaitu terjadinya permasalahan kompleks yang meliputi konflik lahan, defisit air serta alih fungsi lahan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW di Kabupaten Magetan sudah baik dalam pengimplementasi kebijakannya, akan tetapi ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi ketika pelaksanaannya yaitu masalah dengan lingkungan yang menjadi masalah krusial. Selain itu, adanya faktor penghambat dari kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Didukung dengan hasil penelitian lainnya menurut Alghazali (2019) bahwa dalam evaluasi kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Purwakarta (RTRW) Tahun 2012-2031 dalam pelaksanaannya Perda sudah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam konteks penerapan Perda terkait dengan pembangunan kawasan industri di

Kabupaten Purwakarta, khususnya di daerah Kecamatan Babakancikao.

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu hal yang cukup penting karena menyangkut dengan masalah sosial yang artinya melibatkan orang banyak. Sehingga dalam perencanaan tata ruang wilayah perlu di perhatikan dari berbagai aspek ketika melakukan pembangunan baik itu pembangunan industri atau perumahan.

Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam konteks tata ruang bukan termasuk kawasan industri, namun kenyataannya berdiri beberapa industri di Desa Cibodas. Hal ini dapat dilihat dari aspek kebijakan terkait dengan penataan ruang, maka menurut peneliti ini merupakan penyelewengan dari ketentuan yang seharusnya. Hal tersebut sudah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Purwakarta pada Bab III pasal 5 mengenai strategi penataan ruang yang diantaranya meliputi penyediaan ruang yang di peruntukkan untuk industri di wilayah bagian utara, kemudian mendorong investasi pembangunan kawasan industri, pemanfaatan fasilitas dan merelokasikan secara bertahap kegiatan industri ke lokasi yang diperuntukkan industri/kawasan industri. Kebijakan rencana tata ruang

wilayah diciptakan untuk memetakan tata ruang sesuai dengan peruntukannya yang mana tidak akan merusak atau mengganggu lahan, seperti lahan pertanian, pemukiman dan perkebunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam arti sempit administrasi dikemukakan oleh Silalahi dalam (Marliani, 2018:19) disebut sebagai ketatausahaan yang itu artinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tata usaha. Sejatinya tata usaha merupakan pekerjaan yang dapat mengendalikan informasi, seperti pada kegiatan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau dikenal dengan *clerical work*. Sementara itu dikatakan oleh Soetarto & Soewarno dalam Marliani (2018:18) administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama pada sekelompok manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang mana dapat di terapkan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Utrecht dalam (Congge, 2017:17) administrasi negara ialah berupa gabungan atau jabatan (aparatur/alat) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah (Presiden dan para Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan kepada badan hukum dan kehakiman. Sederhananya, administrasi

negara dibawah pimpinan presiden dan para menteri dan hanya mengerjakan sebagian dari tugas pemerintah.

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik yaitu apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*). Artinya apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya yang mana kebijakan tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah (Firdaus, 2020:59).

Winter menyatakan dalam bukunya Nurdin (2019:136) bahwa akar dari permasalahan yang sering terjadi pada implementasi kebijakan ada pada proses perumusan kebijakan (*policy formulation*). Hal ini dikarenakan adanya konflik yang terjadi pada proses kebijakan sehingga kebijakan yang dipilih pun tidak jelas seperti teori kausalitas (*chausal theory*) karena kurangnya hubungan antara tujuan yang di tetapkan (dalam proses formulasi) dengan sarana-sarana yang dipilih dalam bentuk-bentuk kebijakan. Selain itu, kebijakan yang sifatnya simbolis (*symbolic policies*) di adopsi untuk memecahkan suatu permasalahan yang muncul meskipun tidak menawarkan sarana-sarana penunjang untuk mencapai tujuan.

Hal ini dikuatkan dengan yang dikemukakan oleh Rusitiadi et al dalam (Darmawati, Choirul Saleh, 2015:378) terkait dengan implementasi kebijakan

publik rencana tata ruang wilayah, terutama dalam penataan ruang perlu memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa hal agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga menurut Rustiadi et al dalam (Darmawati, Choirul Saleh, 2015) bahwa penataan ruang perlu memiliki tiga urgensi diantaranya: Optimalisasi sumber daya (prinsip sumber daya efektifitas dan efisiensi), alat dan wujud dan distribusi (prinsip pemerataan dan keadilan), dan keberlanjutan.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah fungsi suatu jenis lahan menjadi fungsi lain. Berbagai lahan dapat dialih fungsikan menjadi berbagai jenis fungsi lainnya, hal tersebut tentu memberikan manfaat dan biaya yang berbeda-beda dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut (Prasada & Rosa, 2018:213). Hal serupa terjadi pada wilayah Kabupaten Purwakarta, salah satunya di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari yang seharusnya lahan tersebut tidak digunakan untuk industri. Namun pada fakta di lapangannya lahan yang dimiliki warga beralih fungsi menjadi industri yang seharusnya dalam tata ruang wilayah lahan tersebut tidak digunakan untuk industri. Terlebih industri tersebut ada pada wilayah perkampungan, tidak sejalan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purwakarta pasal 5.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif sehingga peneliti menjadi instrumen dalam suatu penelitian ini. Kemudian dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Peneliti juga lebih menekankan pada objek studi sesuai dengan lingkup yang akan diteliti dan teori pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mantra dalam Siyoto & Sodik (2015:27) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sehingga peneliti dapat mengidentifikasi objek-objek yang ada pada lokasi penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan terkait dengan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta dalam hal alih fungsi lahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Penelitian yang dilakukan ini akan diuraikan dan dibahas berdasarkan temuan atau data yang didapatkan di lapangan melalui observasi dan studi wawancara dengan beberapa pihak seperti masyarakat, perwakilan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, perwakilan dari aparat Desa Cibodas dan masyarakat yang tinggal dekat

dengan industri. Implementasi kebijakan sederhananya yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan yang diikuti masyarakat dengan harapan dapat memberikan suatu perubahan atau sering di sebut dengan *output*. Hal yang serupa pun di ungkapkan oleh Ripley dan Frenklin dalam buku Budi Winarno (2012:148) bahwa implementasi yaitu apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*output*). Sehingga implementasi menyangkut dengan suatu tindakan para pejabat pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan sesuai dengan program atau aturan yang dibuat.

Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi (*Organizational And Interorganizational Behavior*)

Keberhasilan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta dalam hal alih fungsi lahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari yaitu ada pada perilaku organisasi antar organisasi yang ada, maka dari itu dalam pelaksanaannya ada aspek dari keberhasilan yang dapat dilihat diantaranya meliputi dimensi komitmen organisasi dan koordinasi organisasi.

Steer & Porter dalam (Prambudi, 2019) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi lebih dari sekedar keanggotaan formal saja melainkan adanya suatu sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk

mengusahaakan tingkat upaya yang lebih tinggi bagi kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki kawasan industri, diantaranya seperti Kawasan Industri Bukit Indah City (BIC), Kawasan Industri Cikao dan juga Kawasan Industri Sumber Karya Utama. Melihat dari undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan adanya penertiban industri agar pihak industri dapat masuk kawasan industri yang mana dalam undang-undang perindustrian tersebut mewajibkan semua perusahaan untuk menjalankan usaha mereka di kawasan industri. Sehingga pemerintah dapat memantau dan meminimalisir dampak pencemaran lingkungan yang muncul dari operasional pabrik.

Namun secara praktiknya masih banyaknya industri yang dibangun dan berdiri di luar kawasan industri, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang perindustrian bahwa industri-industri yang berada di luar kawasan seharusnya direlokasikan ke kawasan industri. Akan tetapi pada fakta dilapangannya industri-industri tersebut ada ditengah-tengah lingkungan Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Dalam Peraturan Daerah bahwa rencana tata ruang wilayah tujuannya untuk memetakan tata ruang sesuai

dengan peruntukannya yang mana tidak mengganggu lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Maka dari itu, hal apa yang dilakukan oleh para birokrat pemerintah dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan peraturan daerah No. 11 tahun 2012 tentang kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta.

Komitmen organisasi

Steer & Porter dalam Prambudi (2019:12) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi lebih dari sekedar keanggotaan formal saja melainkan adanya suatu sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahaakan tingkat upaya yang lebih tinggi bagi kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan. "Selama ini sudah baik, Cuma kadang-kadangkannya masyarakat di lahan LP2B itu kan gak bisa di bangun rumah. Ya kita gak bisa ngapa-ngapain, kasarnya tanah-tanah saya ya di bangun terserah saya. Tapi tidak keluar IMB. " (Hasil wawancara Bapak ET, 16 Maret 2023).

Dari hasil wawancara tersebut implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta sudah cukup baik walaupun kesadaran dari masyarakat masih kurang dikarenakan masih adanya masyarakat yang membangun rumah di lahan LP2B. Walaupun demikian secara praktiknya ketika Peraturan Daerah sampai pada masyarakat tidak sepenuhnya sesuai

dengan Perda. Melihat dari hasil observasi, adanya penyelewengan peraturan yang seharusnya lahan yang berada di Desa Cibodas tidak beralih menjadi industri, karena sebagaimana yang diketahui Desa Cibodas Kecamatan Bungursari masuk dalam kategori perkampungan dengan masih banyaknya pemukiman, perkebunan dan pertanian.

Koordinasi organisasi

Dibutuhkannya suatu usaha yang sinkron atau teratur dengan tujuan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan G. R Terry dalam Maldini (2022:12). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah mengatakan: "Ya ada koordinasi, pemerintah desa yang baru di kita kan baru berjalan satu tahun. Sepertinya kalo misalnya iuran desa per tahun dari perusahaan suka ada *income* ke Desa itu pun digunakan untuk ATK." (Hasil wawancara Ibu DH, 15 Februari 2023). Begitu pun dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang "Untuk pengawasannya kita kerjasama dengan satpol PP, kita kan SDMnya terbatas. Satpol PP biasanya di tiap desa itu kan ada. Nah itu jadi dari satpol PP biasanya kita koordinasi. IMB juga biasanya kalo ada yang bikin IMB atau nyalahin biasanya juga mereka taunya dari satpol PP. Karena dari IMB sendiri sama

seperti kita terbatas SDMnya.” (Hasil wawancara Bapak ET, 16 Maret 2023)

Perilaku Birokrasi Level Bawah

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo dalam Lutfil (2015:3) mendefinisikan diskresi merupakan kebebasan bertindak atau disebut dengan pengambilan keputusan dari para pejabat administrasi negara yang memiliki wewenang dalam suatu keputusan. Adakalanya pengambilan keputusan secara bebas atau disebut dengan diskresi ini akan menyebabkan perilaku menyimpang dari tugas selaku dari pelaksana kebijakannya yang mengakibatkan peraturan atau kebijakan dibuat tidak berjalan dengan seharusnya ketika implementasi kebijakan dilaksanakan.

Oleh karena itu perilaku birokrasi level bawah menjadi aktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sub Pengendalian Penataan Ruang di Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa “Ada pengambilan keputusan di luar kewenangan, kayak izin kantor pusat tapi di LP2B ya kita gak bisa gimana-gimana itu kan dari pemerintahan. Kemudian IMC itu program dari pemerintah ada LP2B. terus jalan Japek kereta api (Jakarta-Cikampek). KIC itu kan makan LP2B itu kan sebenarnya tidak boleh. Kalo dari pemerintah pusat rencana tata ruang wilayah kebanyakan di revisi karna harus mengikuti program dari pemerintah pusat maksudnya PSN

(Proyek Strategis Nasional)”. (Hasil wawancara Bapak ET, 16 Maret 2023).

Dengan demikian hasil observasi dan wawancara menunjukkan dimensi Diskresi memang dilakukan dalam pengambilan keputusan diluar kewenangannya baik itu oleh pihak Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang ataupun pihak pemerintah desa, hal tersebut dikarenakan adanya program pemerintah pusat dan tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah Desa Cibodas Kecamatan Bungursari. Sehingga dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta tidak berjalan maksimal sesuai dengan yang ada pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purwakarta.

Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Group Behaviour*)

Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberikan pengaruh terhadap efek atau dampak dari kebijakan saja, melainkan pada kinerja para birokrat dan masyarakat Fidarina & Megawati (2022:1982). Hadirnya Industri di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta memberikan respon yang positif untuk sebagian warga yang tinggal di dekat industri. Berikut ini, hasil wawancara peneliti dengan warga yang tinggal dekat dengan industri: “Ada juga keuntungannya, yang pertama punya lahan parkir.” (Hasil wawancara Bapak RM, 19 Maret 2023).

Makna hasil wawancara tersebut yaitu kehadiran industri di Desa Cibodas ternyata tidak hanya memberikan dampak negatif saja, namun juga memberikan dampak yang positif. Hal tersebut, diungkapkan oleh Bapak RM bahwa dapat membuka lahan parkir dekat dengan industri tersebut, sehingga dapat menambah pendapatan bagi warga yang tinggal dekat dengan industri yang mana para karyawan boleh menitipkan kendaraannya pada salah satu warga yang membuka lahan parkir dengan tarif tertentu. Meskipun demikian, berbeda dengan yang diungkapkan oleh "Saya sebagai aparatur setempat ya tidak bisa bilang apa-apa dalam artian kalo saya ketat bahasanya kan lain lagi dari orang pabrik. Itu yang menjadi keluhannya, terutama mobil-mobil wing box itu kan besar-besar. Kadang-kadang nyangkut sama kabel, pohon-pohon sedikit agak keberatan. Terutama pohon-pohon yang dipinggir jalan seperti pohon rambutan akhirnya habislah."(Hasil wawancara Bapak EN, 19 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat terganggu dengan industri tersebut karena adanya industri tersebut justru mereka merasa dirugikan seperti setiap hari mereka harus mencium aroma yang kurang sedap yang sampai pada rumahnya, suara bising dari industri dan juga perihal menjanjikan lapangan kerja untuk masyarakat di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten

Purwakarta nyatanya tidak seperti awal yang dijanjikan oleh industri.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Purwakarta dalam hal alih fungsi lahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari berdasarkan fakta di lapangan sebagian besar belum berjalan sebagaimana mestinya. Dapat dilihat dari dimensi komitmen yang masih kurang, baik itu dari pihak pemerintah daerah maupun dari pihak pemerintah desa, kemudian adanya diskresi yang dilakukan oleh pihak dinas sehingga menimbulkan tumpang tindihnya suatu peraturan daerah dengan peraturan pusat dan adanya respon negatif dari masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Bungursari terkait dengan beralih fungsinya lahan menjadi industri. Meskipun demikian, sebagian kecil masyarakat pun memberikan respon yang positif yaitu bertambahnya pendapatan masyarakat dengan membuka usaha lahan parkir untuk karyawan industri di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghazali, M. R. (2019). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtw) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta (Studi Tentang Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao)*.

- Congge, U. (2017). *Patologi Administrasi Negara*. CV Sah Media.
- Darmawati, Choirul Saleh, I. H. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 378–384.
- Fidarina, N. R., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis Di Universitas Negeri Surabaya Nuzzila Rizki Fidarina. *Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi*, 10(4), 1283–1292.
- Firdaus, D. (2020). *Analisis Kebijakan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara)*.
- Lutfil, A. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 134–150.
- Maldini, R. (2022). *Koordinasi Pemeritah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Limbah Peternakan Babi Di Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten Kampar*. 9, 1–23.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 18.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/Dinamika/Article/View/1743/1407>
- Nuridin, E. S. (2019). Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Maulana Media Grafika.
- Prambudi, W. (2019). *Komitmen Organisasi*. 2001, 12–30.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). The Impact Of Wetland Conversion On Food Security In Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210–224.
- Safitri, D. (2018). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai*. 1.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Winarno, B. (2012). *Kabijakan Publik*. CAPS (Center For Academic Publishing Service).